

**PENGARUH *MANDATORY SPENDING*, INVESTASI DAN
PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI SELURUH PROVINSI DI JAWA DAN SUMATERA
TAHUN 2011-2015**

(Skripsi)

Oleh
HARDIANSA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

Pengaruh *Mandatory Spending*, Investasi, dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi di Jawa dan Sumatera Tahun 2011-2015

Oleh
Hardiansa Nur Syahputra

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kepatuhan provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera terhadap *mandatory spending* fungsi pendidikan dan *mandatory spending* fungsi kesehatan, selain itu juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *mandatory spending*, investasi dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Jawa dan Sumatera. Periode penelitian dimulai dari tahun 2011-2015 dengan sampel seluruh provinsi di Jawa dan Sumatera. Penelitian terdiri dari dua tahap yaitu pertama, kepatuhan provinsi di Jawa dan Sumatera terhadap *mandatory spending* akan diukur menggunakan persentase belanja pemerintah fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan terhadap APBD. Kedua pengaruh *mandatory spending*, investasi dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa dan Sumatera diukur menggunakan regresi linier berganda dengan model pendekatan *fixed effect*.

Hasil penelitian kepatuhan provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera terhadap *mandatory spending* menunjukkan bahwa provinsi yang mematuhi *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah Provinsi DKI Jakarta sedangkan provinsi yang mematuhi *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hasil uji regresi linier berganda diperoleh bahwa *mandatory spending*, investasi, dan pertumbuhan penduduk secara parsial dan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Jawa dan Sumatera. Berdasarkan hasil tersebut, maka saran dalam penelitian ini yaitu pertama, kesadaran pemerintah provinsi terhadap *mandatory spending* harus dapat ditingkatkan. Kedua investasi pemerintah melalui belanja modal perlu dioptimalkan. Ketiga kualitas sumber daya manusia di provinsi harus dapat dimaksimalkan.

Kata Kunci : Belanja Modal, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, *Mandatory Spending*.

ABSTRACT

Influence of Mandatory Spending, Investment, and Population Growth on Economic Growth All Province In Java and Sumatera Year 2011-2015

By
Hardiansa Nur Syahputra

The purpose of this research is to obtain an overview of the compliance of provinces in Java and Sumatera to mandatory spending on education functions and mandatory spending on health functions, as well as to find out how much influence the mandatory spending, investment and population growth on the economic growth of all provinces in Java and Sumatera. The research period starts from 2011-2015 with samples of all provinces in Java and Sumatera. The research consisted of two stages first, provincial compliance in Java and Sumatera on mandatory spending would be measured using the percentage of government spending on education function and health function on APBD. Second effects of mandatory spending, investment and population growth on economic growth in Java and Sumatera were measured using multiple linear regression with fixed effect approach model.

The results of compliance research of provinces in Java and Sumatera on mandatory spending indicate that provinces that comply with mandatory spending on education function is DKI Jakarta Province, while provinces that comply with mandatory spending of health function are West Sumatera, Bengkulu, Lampung, Central Java and East Java. The result of multiple linear regression test shows that mandatory spending, investment, and population growth partially and together have positive and significant influence to the economic growth of all provinces in Java and Sumatera. Based on these results, the suggestion in this research is first, the provincial government's awareness of mandatory spending should be improved. Second government investments through capital expenditures need to be optimized. And Third qualities of human resources in the province should be maximized.

Kata Kunci : Capital Expenditures, Economic Growth, Investment, *Mandatory Spending*, Population Growth,.

**PENGARUH *MANDATORY SPENDING*, INVESTASI DAN
PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI SELURUH PROVINSI DI JAWA DAN SUMATERA
TAHUN 2011-2015**

Oleh

HARDIANSA NUR SYAHPUTRA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

Judul Skripsi

: **PENGARUH *MANDATORY SPENDING*,
INVESTASI DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
SELURUH PROVINSI DI JAWA DAN SUMATERA
TAHUN 2011-2015**

Nama Mahasiswa

: **Hardiansa Nur Syahputra**

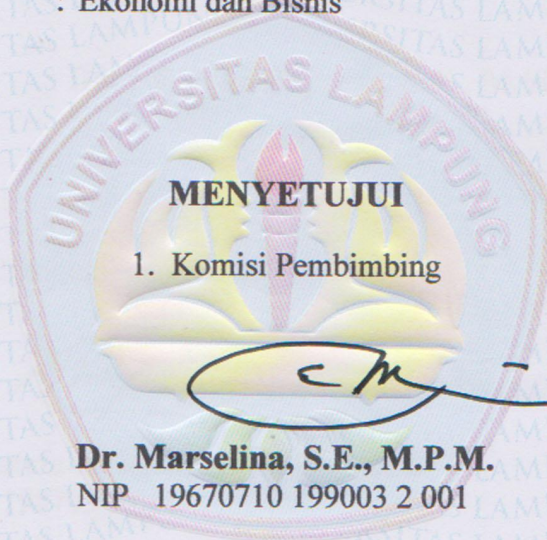
No. Pokok Mahasiswa : **1311021038**

Jurusan

: **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**



2. **Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**

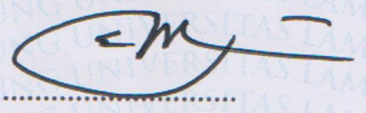
Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP 19660621 199003 1 003 *ns*

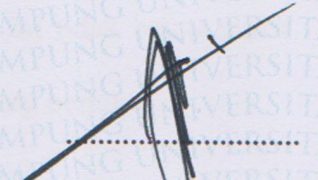
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

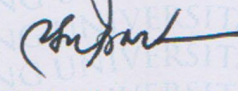
Ketua : Dr. Marselina, S.E., M.P.M.



Penguji I : Dr. Nairobi, S.E., M.Si.



Penguji II : Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.

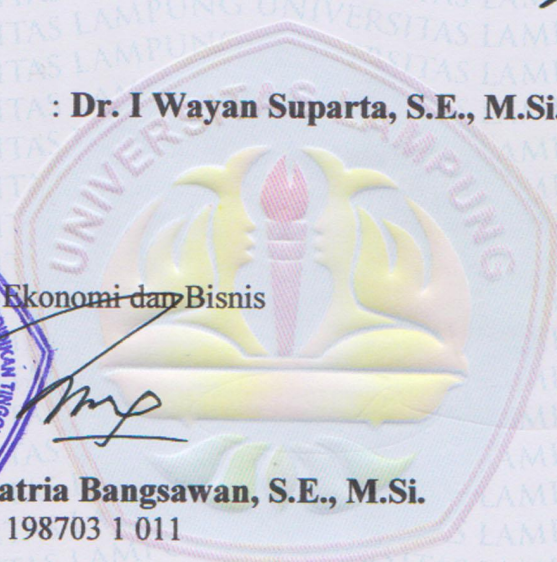


2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.

NIP 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juni 2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertadatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Juli 2017



Hardiansa Nur Syahputra

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Hardiansa Nur Syahputra lahir di Kota Palembang, 25 april 1996, merupakan anak ke lima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Baharudin dan Ibu Yulia. Penulis merupakan anak laki-laki satu-satunya diantara lima bersaudara tersebut.

Penulis menempuh pendidikannya dimulai dari bangku Taman Kanak-kanak Hijriyah II Palembang tahun 2000, dilanjutkan ke MI Hijriyah II Palembang dari tahun 2001 dan lulus tahun 2007, dilanjutkan ke SMPN 7 Palembang dari tahun 2007 dan lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke SMAN 19 Palembang dari tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013 dengan konsentrasi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Pada tahun 2013 penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Pada tahun 2014, penulis mengikuti Kuliah Kunjung Lapangan (KKL) kebeberapa instansi yaitu Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Perencana Pembangunan Nasional. Selanjutnya penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2016 di Desa Gayau, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

Kedua orang tuaku, Bapak Baharudin dan Ibu Yulia yang terus-menerus mendoakan, menyayangi, menghibur dan memberikan semangat kepadaku.

Terima kasih untuk semua perjuangan Bapak dan Ibu berikan kepadaku. Dan juga kupersembahkan kepada mbak-mbakku tercinta Mbak Neni Sulyanti, S.Si., (Almh) Mbak Miniarti, S.S., Mbak Nira Yani, S.Pd., dan Mbak Wina Septiani yang selalu menghibur, membantu dan mendengarkan keluh kesahku.

Dan juga kepada Almamaterku tercinta, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

MOTTO

“Berjuanglah sebelum benar-benar tidak ada harapan lagi untuk hal itu diperjuangkan”

(Hardiansa Nur Syahputra)

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Mandatory Spending*, Investasi dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi di Jawa dan Sumatera Tahun 2011-2015” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi, penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M. selaku Pembimbing dan Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan ilmu, memberikan nasehat dan pengarahan serta saran dalam penyusunan skripsi penulis.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. dan Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran dan nasehat yang bermanfaat bagi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H.Satria Bangsawan, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

5. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan hingga selesai.
7. Orang tuaku tercinta, Bapak Baharudin dan Ibu Yulia atas semua kasih sayang, semangat, dan doa yang tiada hentinya diberikan untuk penulis.
8. Saudari kandungku, kakak iparku, serta keponakan, Mbak Neni Sulyanti, S.Si., (Almh) Mbak Miniarti, S.S., Mbak Nira Yani, S.Pd., Mbak Wina Septiani, S.Pd., Kak Ishak, dan si kembar Muhammad Fardhan Adib dan Muhammad Farhan Alim yang tiada hentinya menghibur dan memberikan bantuan dalam bentuk materi ataupun non materi. Terimakasih juga untuk semua motivasi yang telah kalian berikan.
9. Ayu Qibtiyah, A.Md. Terima kasih atas doa, kasih sayang, perhatian dan dukungannya selama ini, yang selalu sabar mendengarkan baik keluh kesah maupun keceriaan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat SMA, Nopri, Aji, Doni, Boy, Madon, Wahyu dan yang lainnya. Terima kasih telah mengisi waktu liburan penulis selama ini, canda tawa dan kekonyolan kalian sangatlah menghibur ketika dalam keadaan bingung dalam melanjutkan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku yang saling beda konsentrasi Fadeli Yusuf Afif dan Ilham Rusdi Choir yang selalu memberikan saran, dukungan dan bantuan selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

12. Keluarga besar EP Publik dan Fiskal, Agung, Arif, Andan, Wayan, Wika, Mahmud, Bang Paul, Hevix, Thomas, Bobby, Nia, Putrisia, Anggun, April, Ayu, Bella, Happy, Nova, Retno, Ria, Ike, Riana dan Sekar. Terima kasih atas semua dukungan kalian selama proses perkuliahan sampai selesai.
13. Teman-teman EP 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan selama proses perkuliahan sampai selesai, serta kebersamaan dalam canda dan tawa.
14. Teman KKN, Bang Rio, Bang Fero, Bang Aji, Andi, Putri, dan Gita. Terima kasih untuk kebersamaan dalam menjalankan progja selama 2 bulan.
15. Kakak tingkat EP angkatan 2009-2012 serta adik-adik EP angkatan 2014-2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun terima kasih atas dukungannya.
16. Staf FEB dan Jurusan EP yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
17. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan, dan semoga karya ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 27 Juli 2017
Penulis,

Hardiansa

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12

II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Teoritis	14
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	16
a. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah.....	18
b. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan investasi	21
c. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk	22
2. Pengeluaran Pemerintah.....	23
a. Konsep pengeluaran pemerintah	23
b. Teori pengeluaran pemerintah.....	24
c. <i>Mandatory spending</i>	29
3. Investasi.....	35
a. Konsep investasi.....	35
b. Teori investasi	36
c. Belanja modal.....	37
4. Kependudukan.....	40
a. Konsep penduduk.....	40
b. Teori kependudukan.....	40
c. Pertumbuhan penduduk.....	42

B. Penelitian Terkait	42
C. Rerangka Pemikiran	45
D. Hipotesis Penelitian.....	47

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data	48
B. Definisi dan Operasionalisasi Variabel	50
1. <i>Mandatory spending</i>	50
2. Investasi.....	51
3. Pertumbuhan penduduk.....	52
4. Pertumbuhan ekonomi.....	53
C. Model dan Alat Analisis.....	53
D. Uji Signifikansi Model	57
1. Uji signifikansi <i>fixed effect</i>	57
2. Uji signifikansi <i>random effect</i>	57
3. Uji signifikansi <i>fixed effect</i> atau <i>random effect</i>	57
E. Uji Asumsi Klasik	58
1. Uji multikolinieritas	59
2. Uji heteroskedastisitas	59
F. Uji p value	60
G. Uji F Statistik (<i>overall test</i>).....	61
H. Koefisien Determinasi (R^2)	62

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepatuhan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera terhadap <i>Mandatory Spending</i>	63
B. Hasil Regresi	66
C. Hasil Uji Signifikansi Model.....	66
D. Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	67
1. Hasil uji multikolinieritas.....	67
2. Hasil uji heteroskedastisitas	67
E. Hasil Uji p value.....	67
F. Hasil Uji F Statistik.....	68
G. Hasil Koefisien Determinasi	69
H. Pembahasan.....	69
1. Pengaruh <i>mandatory spending</i> fungsi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi.....	71
2. Pengaruh <i>mandatory spending</i> fungsi kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi.....	72

3. Pengaruh investasi (belanja modal) terhadap pertumbuhan ekonomi.....	73
4. Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.....	73

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi di Jawa dan Sumatera Tahun 2011-2015 (<i>dalam persentase</i>).....	5
2. Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan Seluruh Provinsi di Jawa dan Sumatera Tahun 2011-2015 (<i>dalam milyaran rupiah</i>).....	8
3. Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan Seluruh Provinsi di Jawa dan Sumatera Tahun 2011-2015 (<i>dalam milyaran rupiah</i>).....	10
4. Jenis dan Besaran Pendapatan Negara yang Dibagihasilkan ke Daerah	31
5. Deskripsi Variabel.....	50
6. Kepatuhan <i>Mandatory Spending</i> terhadap <i>Mandatory Spending</i>	63
7. Hasil Uji Signifikansi Model.....	66
8. Hasil Uji p value.....	68
9. Hasil <i>Cross-Section Fixed Effect</i>	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	26
2. Kurva Pengeluaran Pemerintah Peacock dan Wiseman.....	28
3. Bagan Rerangka Pemikiran	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Rasio Belanja Modal terhadap APBD Seluruh Provinsi di Jawa dan Sumatera Tahun 2011-2015	L1
2. Data Pertumbuhan Penduduk Seluruh Provinsi di Jawa dan Sumatera Tahun 2011-2015	L2
3. Data Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan terhadap APBD Seluruh Provinsi di Jawa dan Sumatera Tahun 2011-2015.....	L3
4. Data Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan terhadap APBD Seluruh Provinsi di Jawa dan Sumatera Tahun 2011-2015	L4
5. Hasil Regresi dengan Model <i>Fixed Effect</i>	L5
6. <i>Cross-Section Fixed Effect</i>	L6
7. Hasil Uji Signifikansi <i>Fixed Effect</i>	L6
8. Hasil Uji Signifikansi <i>Random Effect</i>	L7
9. Uji Asumsi Klasik : Multikolinieritas	L7
10. Uji Asumsi Klasik : Heteroskedastisitas	L8

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah terjadinya keruntuhan era orde baru pada tahun 1998 maka munculah era reformasi. Berbagai regulasi pun dibenahi salah satunya adalah mengubah sistem pemerintahan dari terpusat/sentralisasi menjadi desentralisasi. Proses desentralisasi ini sendiri dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Awal pelaksanaannya desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter serta keagamaan.

Desentralisasi fiskal sendiri dari sisi belanja (*expenditure*) didefinisikan sebagai kewenangan untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Fungsi dari pemerintah pusat hanyalah memberikan saran atau arahan pada pelaksanaan pemerintahan di daerah (Haryanto, 2015).

Untuk itu lembaga legislatif yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mencoba untuk mengatur pengeluaran atau belanja pemerintah yang wajib dan telah diatur oleh undang-undang atau konstitusi yang disebut dengan *mandatory spending*.

Berikut beberapa aturan mengenai *mandatory spending* menurut Dirjen Anggaran (2014) dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah.

1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-4

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-4, khususnya pasal 31 ayat (4) mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, khususnya pasal 171 ayat (2) menyatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tentu lembaga legislatif yang mempunyai wewenang untuk membuat dan mengubah undang-undang tidak langsung menetapkan peraturan ini tanpa pertimbangan apapun, untuk UUD 1945 amandemen ke-4, khususnya pasal 31 ayat (4) yang menyatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi

kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional. Peraturan ini berkaitan erat dengan UUD 1945 amandemen ke-4, pasal 31 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat (1) dan (2) itu juga erat kaitannya dengan ideologi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila tepatnya pada sila kelima yang mana berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Begitu juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 171 ayat (2) yang menyatakan Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Pasal ini juga berkaitan cukup erat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 170 ayat (3) yang menyatakan sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan sumber lain. Undang-Undang ini juga memiliki kaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dari peraturan tersebut sudah jelas bahwa lembaga legislatif sudah memiliki dasar yang cukup kuat dalam mengubah dan membuat peraturan perundang-undangan tersebut dari segi dasar hukum yang digunakan. Sedangkan dari segi sosial dan ekonomi, pengeluaran fungsi pendidikan dan pengeluaran fungsi kesehatan ini merupakan salah satu determinan penting yang mempengaruhi pembangunan manusia, yang mana pengeluaran fungsi pendidikan dan pengeluaran fungsi

kesehatan ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia (Ananta, 2013) hal ini berarti dengan adanya peningkatan pengeluaran fungsi pendidikan maka akan meningkatkan juga pembangunan manusia yang terdapat di suatu provinsi. Meningkatnya pembangunan manusia maka akan membuat kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat yang berakhir dengan meningkatnya produktivitas yang dihasilkan oleh masyarakat sesuai juga dengan fungsi produksi dimana.

$$Q = f(K, L) \quad (1.1)$$

Hal ini berarti dengan meningkatnya kualitas tenaga kerja dengan asumsi modal yang tetap maka produksi yang dihasilkan juga akan meningkat. Dengan produksi yang meningkat maka faktor produksi yang tersedia akan terserap dengan penuh sehingga dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

Selain itu secara langsung pengeluaran pemerintah ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia (Sodik, 2007). Pertumbuhan ekonomi yang merupakan acuan kesuksesan bagi suatu pemerintahan atau dapat dikatakan juga salah satu acuan dari tujuan pemerintahan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara tidak langsung berarti adanya peningkatan juga pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan sampel seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, hal ini karena rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ini memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi dari Pulau

Sulawesi, sedangkan jika ditinjau dari sisi letaknya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ini memiliki letak yang strategis sebagai penunjang perekonomian di Indonesia.

Tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2011-2015, hal ini karena peraturan terkait yang mengatur alokasi belanja pemerintah fungsi kesehatan ini baru disahkan pada tahun 2009 dan tahun 2010 dianggap sebagai tahun pertama dalam penerapan peraturan ini, sehingga masih ada kemungkinan banyak provinsi yang belum mengetahui peraturan ini. Untuk itu berikut data pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Jawa dan Sumatera tahun 2011-2015.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi di Jawa dan Sumatera Tahun 2011-2015 (*dalam persentase*)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	3,28	3,85	2,61	1,55	-0,72
Sumatera Utara	6,66	6,45	6,07	5,23	5,1
Sumatera Barat	6,34	6,31	6,08	5,86	5,41
Riau	5,57	3,76	2,48	2,7	0,22
Jambi	7,86	7,03	6,84	7,35	4,21
Sumatera Selatan	6,36	6,83	5,31	4,7	4,5
Bengkulu	6,85	6,83	6,07	5,48	5,14
Lampung	6,56	6,44	5,77	5,08	5,13
Kep. Bangka Belitung	6,9	5,5	5,2	4,67	4,08
Kep. Riau	6,96	7,63	7,21	6,62	6,02
DKI Jakarta	6,73	6,53	6,07	5,91	5,88
Jawa Barat	6,5	6,5	6,33	5,09	5,03
Jawa Tengah	5,3	5,34	5,11	5,28	5,44
DI Yogyakarta	5,21	5,37	5,47	5,16	4,94
Jawa Timur	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44
Banten	7,03	6,83	6,67	5,47	5,37

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi dalam setiap tahunnya terus mengalami fluktuasi. Dan jika dilihat perbandingan antara tahun 2011 dan tahun 2015, hampir semua provinsi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015. Dengan tingkat penurunan yang paling ekstrim adalah Provinsi Riau.

Penurunan pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu dampak dari penurunan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional secara keseluruhan dan juga melemahnya perekonomian dunia di tahun 2015. Pada tahun 2015 provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,02 dan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling rendah adalah Provinsi Aceh dengan pertumbuhan ekonomi -0,72.

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ini. Beberapa diantaranya adalah peningkatan pada konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah dan tingkat ekspor. Seperti perhitungan PDRB menurut pengeluaran berikut.

$$Y = C + I + G + (X-M) \quad (1.2)$$

Dari perhitungan tersebut, dengan kata lain dapat dikatakan ketika adanya peningkatan belanja pemerintah (G) maka akan mendorong peningkatan pada PDRB (Y) dengan meningkatnya PDRB maka secara langsung akan berdampak juga pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah sendiri menurut fungsinya terdiri dari 11 fungsi diantaranya yaitu pelayanan umum,

pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial (Direktorat Penyusunan APBN, 2014: 229).

Khusus untuk fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan sebagai *mandatory spending* ada alokasi wajib yang harus dikeluarkan oleh pemerintah yaitu fungsi pendidikan minimal 20% dari APBD dan fungsi kesehatan minimal 10% dari APBD. Menurut Austin (2015) *mandatory spending* bertujuan untuk program-program yang memberikan hak-hak dari masyarakat seperti program jaminan sosial dan perlindungan kesehatan. Di Indonesia pada saat ini sudah ada beberapa program-program yang memberikan hak-hak dari masyarakat, diantaranya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan lainnya. Sedangkan pada tingkat domestik atau daerah antara lain Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan masih banyak lainnya.

Selain memberikan hak-hak dari masyarakat, tujuan lain dari *mandatory spending* adalah untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di daerah. Dalam penelitian ini *mandatory spending* sebagai variabel bebas, akan digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu berikut data pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan dan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan seluruh provinsi di Jawa dan Sumatera.

Tabel 2. Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan Seluruh Provinsi di Jawa dan Sumatera Tahun 2011-2015 (*Dalam Milyaran Rupiah*)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	961	1.262	1.304	1.237	1.389
Sumatera Utara	391	384	223	301	330
Sumatera Barat	116	126	151	153	208
Riau	983	732	663	436	1.029
Jambi	173	241	288	278	314
Sumatera Selatan	256	248	332	330	255
Bengkulu	78,3	133	142	184	197
Lampung	213	403	298	341	337
Kep. Bangka Belitung	31,2	36,6	58,9	84,6	99,4
Kep. Riau	525	232	375	306	373
DKI Jakarta	8.355	9.546	10.766	10.107	10.309
Jawa Barat	684	787	873	436	502
Jawa Tengah	300	312	318	292	388
DI Yogyakarta	161	192	257	213	352
Jawa Timur	385	333	561	472	515
Banten	241	235	264	260	375

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016

Pada Tabel 2 tersebut secara riil selama lima tahun dari 2011 sampai dengan 2015 Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki rata-rata pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan secara riil paling banyak dibandingkan dengan provinsi lainnya yang berada di Jawa dan Sumatera. Namun ini tidaklah aneh mengingat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Indonesia. Ditambah lagi PAD yang dimiliki oleh DKI Jakarta cukup banyak dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia sehingga ruang fiskal yang dimiliki DKI Jakarta pun semakin membesar. Selain itu, rata-rata pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan di Provinsi DKI Jakarta yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan provinsi lainnya di seluruh provinsi Jawa dan Sumatera ini tidak akan merusak

hasil penelitian, karena di dalam penelitian ini data yang akan digunakan adalah persentase dari pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan akan dikalikan dengan 100 persen, sehingga pengeluaran fungsi pendidikan pemerintah provinsi secara riil ini tidak memiliki potensi merusak hasil penelitian.

Diluar dari itu semua, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan ini dapat langsung berdampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berujung dengan adanya percepatan pada pertumbuhan ekonomi sesuai dengan penelitian dari Saraswati (2012). Namun hasil penelitian dari Saraswati (2012) ini berlawanan dengan penelitian oleh Bastias (2010) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pada penelitian ini pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan yang merupakan bagian dari *mandatory spending* ini digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga dalam penelitian ini akan melihat seberapa banyak provinsi yang mematuhi amanat UUD 1945 Amandemen ke-4 pasal 31 ayat (4) ini. Jika pada tabel 2 dilihat secara riil DKI Jakarta merupakan provinsi yang mengalokasikan pengeluaran fungsi pendidikan paling banyak, namun belum tentu DKI Jakarta mematuhi amanat UUD 1945 tersebut. Karena sesuai dengan amanat UUD 1945 pengukurannya tidak ditentukan secara riil nominal rupiah, namun berdasarkan rasionya terhadap total belanja daerah. Peningkatan yang signifikan secara riil disini belum tentu akan mengakibatkan peningkatan yang signifikan juga secara persentase jika dilihat dari rasionya terhadap belanja

daerah. Untuk itu pada penelitian ini akan diketahui berapa banyak provinsi yang mematuhi amanat UUD 1945 amandemen ke-4 pasal 31 ayat (4) ini.

Belanja pemerintah lainnya yang masuk dalam bagian *mandatory spending* adalah pengeluaran fungsi kesehatan. Berikut data pengeluaran fungsi kesehatan seluruh provinsi di Jawa dan Sumatera tahun 2011-2015.

Tabel 3. Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan Seluruh Provinsi di Jawa dan Sumatera Tahun 2011-2015 (*Dalam Milyaran Rupiah*)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	798	1.018	1.104	982	1.149
Sumatera Utara	151	288	244	367	398
Sumatera Barat	231	306	354	423	516
Riau	296	427	406	324	522
Jambi	196	241	301	346	302
Sumatera Selatan	296	238	174	239	365
Bengkulu	162	197	196	230	307
Lampung	277	447	344	406	394
Kep. Bangka Belitung	195	48,6	72,6	132	152
Kep. Riau	285	86,2	125	227	291
DKI Jakarta	2.481	2.875	3.129	2.971	2.924
Jawa Barat	487	570	465	561	579
Jawa Tengah	921	1.062	1.248	1.751	1.931
DI Yogyakarta	59,2	94,9	173	142	201
Jawa Timur	1.693	2.048	2.256	2.540	2.699
Banten	256	311	334	332	472

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016

Tidak jauh berbeda dengan pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan seluruh provinsi di Jawa dan Sumatera ini juga DKI Jakarta merupakan provinsi yang mengalokasikan belanja kesehatan paling banyak dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera dan Jawa. Sedangkan Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang

mengalokasikan belanja kesehatan paling rendah jika dilihat dari rata-rata pengeluaran fungsi kesehatan selama lima tahun terakhir.

Bedir (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan pengeluaran kesehatan memiliki pengaruh positif pada PDB di seluruh negara berkembang. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan pengeluaran kesehatan, dan pengeluaran kesehatan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran kesehatan ini dapat menjadi penentu untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sedangkan hasil yang berlawanan dari Bastias (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam jangka pendek belanja pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun menurut Levine dan Renelt (1992) sebagai penentu pertumbuhan ekonomi, sebuah penelitian harus menggunakan variabel kontrol, yang mana variabel kontrol adalah variabel yang telah diakui secara luas sebagai penentu pertumbuhan ekonomi. Variabel kontrol terdiri antara lain *initial level of GDP*, pertumbuhan jumlah penduduk, rasio investasi terhadap GDP dan kualitas sumber daya manusia dan yang lainnya.

Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan beberapa dari variabel kontrol tersebut diantaranya adalah pertumbuhan jumlah penduduk dan rasio investasi terhadap APBD. Untuk pertumbuhan jumlah penduduk berdasarkan penelitian Rochaida (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk ini memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

Sedangkan untuk rasio investasi terhadap APBD ini menggunakan data belanja modal untuk melihat rasionya terhadap APBD dan menurut penelitian Rizky, dkk (2016) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu sudah jelas bahwa kedua variabel ini dapat digunakan sebagai variabel kontrol, karena dari penelitian sebelumnya tersebut telah dihasilkan dapat dibuktikan bahwa keduanya memang penentu pertumbuhan ekonomi.

B. Rumusan Masalah

Mandatory spending merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan sebagian dari APBD ke sektor-sektor yang telah diatur menurut undang-undang. *Mandatory spending* ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu acuan kesuksesan pemerintah daerah baik itu provinsi atau kabupaten/kota. Namun berdasarkan data pengeluaran pemerintah angkanya terus meningkat sedangkan pertumbuhan ekonomi di Jawa dan Sumatera cenderung tetap atau bahkan menurun. Tetapi bagaimana pengaruh *mandatory spending* fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan, investasi, dan pertumbuhan penduduk ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa dan Sumatera?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memperoleh gambaran kepatuhan provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera terhadap *mandatory spending* fungsi pendidikan dan juga *mandatory spending* fungsi kesehatan.
2. Seberapa besar pengaruh *mandatory spending* fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan dalam memacu pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Jawa dan Sumatera.
3. Seberapa besar pengaruh investasi dalam memacu pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Jawa dan Sumatera.
4. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan penduduk dalam memacu pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Jawa dan Sumatera.

2. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat dalam penelitian ini.

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung.
2. Sebagai acuan pemerintah provinsi dalam mengalokasikan belanja daerah.
3. Sebagai acuan bagi lembaga legislatif dan lembaga berkepentingan lainnya dalam menetapkan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk memberikan tambahan sumber literatur di Universitas Lampung.

II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Teoritis

Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN/APBD. Kebijakan ini memiliki peran yang penting dan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. Peran tersebut terkait dengan tiga fungsi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi (Dirjen Anggaran, 2014: 7).

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara/daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara/daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi (Dirjen Anggaran, 2014: 8).

Fungsi alokasi berkaitan dengan intervensi pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya agar lebih efisien, sedangkan fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat. Peran penting kebijakan fiskal dalam redistribusi dan alokasi anggaran pemerintah antara lain adalah penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk mempengaruhi sektor-sektor ekonomi atau kegiatan tertentu, untuk menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan antarsektor ekonomi, antardaerah, atau antargolongan pendapatan. Peran kebijakan fiskal juga penting dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial (Direktorat Penyusunan APBN , 2014: 8).

Fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi, sehingga perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh (*full employment*) dengan harga yang stabil. Fungsi stabilisasi yang ditujukan untuk meminimalisir volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian, merupakan esensi utama kebijakan APBN/APBD. Dengan peran stabilisasinya, kebijakan fiskal dipandang sebagai salah satu alat yang efektif untuk memperkecil siklus bisnis. Kebijakan ekspansif fiskal melalui pengalokasian stimulus fiskal pada tahun 2009 mampu menahan ekonomi Indonesia dari dampak krisis, bahkan mampu membuat ekonomi tumbuh positif di tengah kondisi melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Stabilitas ekonomi terjaga, dan kesehatan fiskal dapat diwujudkan. Tentu saja, hal tersebut dapat diwujudkan tidak semata melalui kebijakan fiskal yang

tepat, tetapi didukung oleh kebijakan moneter dan kebijakan lain yang saling bersinergi (Direktorat Penyusunan APBN, 2014: 8).

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode tertentu. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertumbuhan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan. Menurut Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai tiga komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Sedangkan menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyebut keberhasilan pembangunannya, sementara itu untuk, negara yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi (Pujoalwanto, 2014: 87).

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan ekspansi GDP potensial atau output nasional negara. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi terjadi apabila batas kemungkinan produksi (*production possibility frontier*/PPF) bangsa bergeser keluar (Samuelson, 2004: 249).

Pertumbuhan ekonomi meliputi pertumbuhan output potensial pada jangka panjang. Pertumbuhan output per kapita merupakan sasaran penting pemerintah karena berkaitan dengan peningkatan rata-rata riil pendapatan dan standar-standar hidup (Samuelson, 2004: 249).

Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kepada pertumbuhan ekonomi yang berlaku diberbagai negara dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara adalah: kekayaan sumber daya alam dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap masyarakat. Teori yang menerangkan mengenai hubungan diantara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi adalah teori pertumbuhan ekonomi Sollow-Swan (Samuelson, 2004: 250).

Teori pertumbuhan Solow-Swan telah dikategorikan sebagai teori pertumbuhan neoklasik. Model pertumbuhan Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana

pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Menurut teori ini garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori Harrod-Domar, dimana asumsi yang melandasi model ini yaitu (Samuelson, 2004: 250):

1. Tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu, misalnya P per tahun.
2. Adanya fungsi produksi $Q = f(K, L)$ yang berlaku bagi setiap periode.
3. Adanya kecenderungan menabung (propensity to save) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dari output (Q). Tabungan masyarakat $S = sQ$; bila Q naik S juga naik, dan sebaliknya.
4. Semua tabungan masyarakat di investasikan $S = I = K$. Sesuai dengan anggapan mengenai kecenderungan menabung, maka dari output disisakan sejumlah proporsi untuk ditabung dan kemudian diinvestasikan. Dengan begitu, maka terjadi penambahan stok capital.

a. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Musgrave ada beberapa premis yang diterima secara umum dalam masyarakat bahwa: 1) Komposisi *output* yang ada seharusnya berada dalam garis yang sesuai dengan preferensi konsumsi individu dalam masyarakat, 2) Preferensi tersebut digunakan untuk didesentralisasikan dalam membuat keputusan mengapa seluruh perekonomian tidak dipegang oleh swasta. Sebuah perekonomian ideal, yang kompetitif sempurna dimana pengaturan alokasi sumberdaya berasal dari pertukaran sukarela antara barang dan uang pada harga pasar akan menghasilkan kuantitas maksimum barang dan jasa dari segenap sumber daya yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Kenyataan yang ada, pasar tidak selalu hadir dalam wujudnya yang ideal.

Perekonomian pasar seringkali terlilit polusi dan monopoli seiring dengan melonjaknya inflasi atau pengangguran dan pada praktiknya pula bahwa distribusi pendapatan dalam masyarakat *Laissezfaire* sangat tidak merata. Untuk mengatasi kelemahan tersebut pemerintah mengambil peranan penting dalam perekonomian (Pujoalwanto, 2014: 179).

Menurut Adam Smith (dalam Pujoalwanto, 2014: 180) bahwa dalam perekonomian kapitalis, setiap individu yang paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggap terbaik bagi dirinya sendiri. Setiap individu akan melaksanakan aktivitas yang harmonis seakan-akan diatur oleh *invisible hand*. Sehingga perekonomian dapat berkembang maksimum. Sehingga Adam Smith mengatakan bahwa peran pemerintah hanya terbatas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan

oleh pihak swasta, yaitu melaksanakan peradilan, pertahanan-keamanan, dan pekerjaan umum.

Menurut Samuelson (dalam Pujoalwanto, 2014: 180) secara garis besar pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yakni meningkatkan efisiensi, menciptakan keadilan, dan melaksanakan kebijakan stabilisasi. pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi. Pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjaan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi laju inflasi dan pengangguran serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sukanto (dalam Pujoalwanto, 2014: 181) mengemukakan bahwa pada sistem perekonomian campuran, pemerintah berpartisipasi dalam masyarakat sebagai pembeli barang dan jasa. Pemerintah membeli input dari rumah tangga dan mendapatkan hak kepemilikan dari sumber produktif (modal dan tanah). Pemerintah menggunakan input untuk menghasilkan barang dan jasa yang tidak dijual kepada sektor rumah tangga dan perusahaan, tetapi disediakan melalui distribusi tanpa melalui pasar. Namun demikian pemerintah juga memiliki dan menjalankan perusahaan, seperti jasa pelayanan pos, kereta api, dan lain-lain. Untuk membayar barang dan jasa yang dipergunakannya, pemerintah mendapatkan pemasukan dari perusahaan dan rumah tangga, seperti hasil pembayaran pajak, retribusi, royalti, dan *fee*. Pemerintah menggunakan sumber

daya yang produktif untuk menghasilkan barang dan jasa termasuk pertahanan, jalan, sekolah dan jasa-jasa lainnya. Kebijakan makro ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada pada saat itu.

Maka dari itu berdasarkan pandangan ahli di atas, jelas menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan dicapai jika pemerintah dengan berbagai kewenangan dalam menentukan kebijakannya, menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pengeluarannya. Dengan demikian, kebijakan pengeluaran pemerintah yang dapat memberikan peluang bagi terbangunnya pertumbuhan ekonomi, menjadi layak dihadirkan (Pujoalwanto 2014: 182).

b. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Teori Harrod-Domar memberikan perananan penting pada investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya aspek ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi menciptakan pendapatan dan kedua investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan tingkat modal. Aspek pertama inilah yang disebut dengan dampak permintaan investasi dan yang kedua sebagai dampak penawaran investasi.

Sumber investasi berasal dari dua sumber yaitu swasta dan pemerintah, sumber investasi pemerintah berasal dari APBN/APBD. Investasi pemerintah sendiri ada pada pos belanja modal, yang mana belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal

kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah (Direktorat Penyusunan APBN, 2014: 167).

Belanja modal dipergunakan untuk mengelompokkan jenis transaksi berupa (1) Belanja modal tanah; (2) Belanja modal peralatan dan mesin; (3) Belanja modal gedung dan bangunan; (4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; (5) Belanja modal lainnya; (6) Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU) (Direktorat Penyusunan APBN, 2014: 167-169).

c. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk

Penduduk adalah salah satu faktor produksi yang digunakan sebagai input dalam produksi. Dengan penduduk yang banyak maka kemungkinan output yang akan dihasilkan juga akan semakin meningkat. Seperti dalam fungsi produksi dimana:

$$Q = f(k,l) \tag{2.1}$$

Hal ini berarti dengan jumlah penduduk yang meningkat maka akan menghasilkan output produksi yang semakin meningkat juga dan akhirnya akan membuat perekonomian menjadi semakin lebih baik.

Namun pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi juga tidak akan mendukung pertumbuhan ekonomi malah akan membuat perekonomian menjadi semakin menurun terutama jika jumlah penduduk yang banyak tersebut merupakan penduduk yang tidak sedang berada pada usia yang produktif.

Secara umum, di negara yang sedang berkembang mempunyai angka beban tanggungan yang tinggi akibat besarnya jumlah penduduk usia muda. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi pembangunan ekonomi, karena: 1) penduduk golongan usia muda, cenderung untuk memperkecil angka penghasilan per kapita dan mereka semua merupakan konsumen dan bukan sebagai produsen dalam perekonomian tersebut; 2) adanya golongan penduduk usia muda yang besar jumlahnya di suatu negara berakibat pada alokasi faktor-faktor produksi kearah investasi sosial, dan bukan ke investasi modal. Akibatnya, di negara sedang berkembang pertumbuhan ekonomi cenderung lambat (Pujoalwanto, 2014: 102).

2. Pengeluaran Pemerintah

a. Konsep pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Prasetya, 2012: 5). Pengeluaran pemerintah merupakan bagian kegiatan pemerintah dalam melaksanakan fungsi alokasinya. Ada beberapa tolak ukur untuk melihat seberapa besar peran pemerintah dalam suatu perekonomian. Tolak ukur tersebut yaitu (Djayasinga, 2006: 38):

1. Pengeluaran pemerintah
2. Besarnya penerimaan pajak oleh pemerintah
3. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor publik

4. Jumlah unit organisasi pemerintah
5. Perkiraan beban yang ditanggung oleh individu masyarakat

Secara definisi pengeluaran pemerintah yaitu semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah dan pemerintah langsung memperoleh balas jasa dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran pemerintah berupa transfer pemerintah yaitu semua pengeluaran pemerintah dan pemerintah tidak langsung memperoleh balas jasa dari pengeluaran tersebut. Secara garis besar, pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua yaitu (Djayasinga, 2006: 40):

1. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk membiayai kegiatan rutin pelaksanaan pemerintahan.
2. Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan (sektor-sektor).

b. Teori pengeluaran pemerintah

Dalam pengeluaran pemerintah, mempunyai beberapa teori dalam pengeluaran pemerintah. Berikut teori dari pengeluaran pemerintah.

1) Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih

diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat (Prasetya, 2012: 6).

2) Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

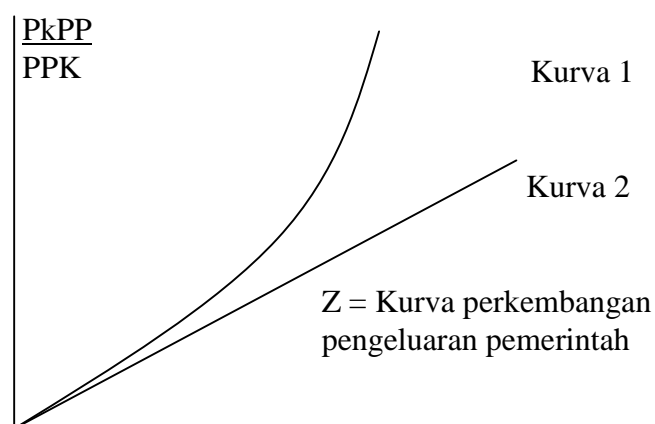
Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut (Prasetya, 2012: 6):

$$\frac{PP_kP}{PPK_1} < \frac{P_kPP_n}{PPK_2} < \dots < \frac{P_kPP_n}{PPK_n} \quad (2.2)$$

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1, 2, ..., n : Jangka waktu (tahun)



Sumber : Prasetya, 2012

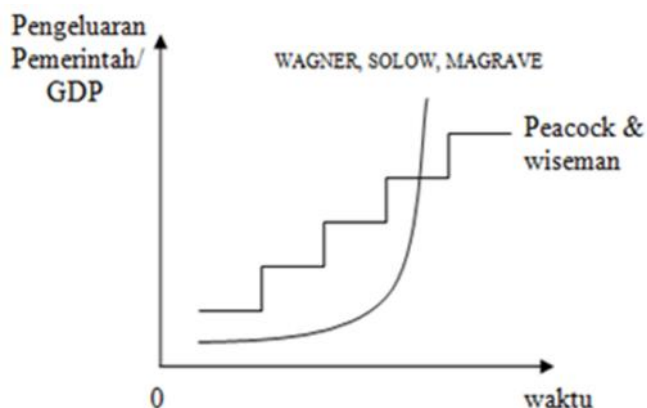
Gambar 1. Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat (Prasetya, 2012: 7).

3) Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Prasetya, 2012: 7).

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena (Prasetya, 2012:8).



Sumber : Prasetya, 2012

Gambar 2. Kurva Pengeluaran Pemerintah Peacock dan Wiseman

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya (Prasetya, 2012: 10).

4) Teori Batas Kritis Colin Clark

Collin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregat. Di lain pihak, pengeluaran

pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat (Prasetya, 2012: 10).

c. *Mandatory Spending*

Dalam pengeluaran pemerintah terdapat aturan perundang-undangan yang mengamanatkan secara khusus bahwa pemerintah harus mengalokasikan proporsi tertentu dari penerimaan negara untuk digunakan pada pos belanja tertentu. Aturan “pengkaplingan” penggunaan pendapatan negara ini sering disebut dengan istilah *earmarking* (dilihat dari sisi pendapatan negara) atau *mandatory spending* (dilihat dari sisi belanja yang diamanatkan) (Dirjen Anggaran, 2014: 156). Definisi *mandatory spending* ini sendiri menurut Fay (2014: 3) adalah suatu program dimana pemerintah federal wajib memberikan anggaran kepada program tersebut dengan subtansif dari undang-undang yang relevan.

Sedangkan *mandatory spending* menurut Austin (2015) adalah pengeluaran pemerintah yang dikendalikan oleh hukum yang mana pengeluarannya bertujuan untuk program-program yang memberikan hak-hak dari masyarakat seperti program jaminan sosial dan perlindungan kesehatan.

Tujuan lain dari *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di daerah. Namun pada prakteknya yang jadi masalah *mandatory spending* ini menjadi beban bagi APBN dan APBD karena pengeluaran itu cukup memakan banyak dari ruang fiskal yang ada.

Berikut ini adalah beberapa aturan perundangan yang menjadi dasar adanya keterkaitan antara komponen pendapatan negara dan belanja negara di Indonesia (Direktorat Jenderal Anggaran, 2014: 156).

1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sebagian pendapatan negara secara hukum wajib dialokasikan untuk alokasi belanja transfer ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dana tersebut bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu. DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sementara itu, DBH yang bersumber dari sumber daya alam, atau biasa disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi penerimaan hasil kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan, minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi. Penerimaan kehutanan memiliki tiga komponen utama yang dibagikan ke daerah, yaitu Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), serta Dana Reboisasi. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan daerah dibagikan setelah dikurangi

komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerimaan APBN, baik yang berasal dari penerimaan pajak ataupun penerimaan sumber daya alam dibagi antara pemerintah pusat dengan daerah sesuai dengan proporsi tertentu.

Tabel 4. Jenis dan Besaran Pendapatan Negara yang Dibagihasilkan ke Daerah

Penerimaan	Besaran	Transfer ke Daerah
1. Penerimaan Pajak		
- PBB	Seluruh Penerimaan di luar Biaya Pungut	DBH PBB
- BPHTB	100%	Dikelola Daerah
- PPh Pasal 25/29 OP dan PPh Pasal 21	20%	DBH PPh Perseorangan
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak		
- Kehutanan		DBH Kehutanan
- <i>IIUPH</i>	80%	DBH <i>IIUPH</i>
- <i>PSDH</i>	80%	DBH <i>PSDH</i>
- <i>Dana Reboisasi</i>	40%	DBH <i>Dana Reboisasi</i>
- Pertambangan Umum	80%	DBH Pertambangan Umum
- Perikanan	80%	DBH Perikanan
- Pertambangan Minyak Bumi	15,5%	DBH Minyak Bumi
- Pertambangan Gas Bumi	30,5%	DBH Gas Bumi
- Pertambangan Panas Bumi	80%	DBH Panas Bumi

Sumber : Direktorat Jenderal Anggaran, 2014

b) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Proporsi alokasi DAU berdasarkan undang-undang ditetapkan minimal sebesar

26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto) APBN. Sementara itu, PDN Netto adalah penerimaan negara setelah dikurangi dengan penerimaan yang dibagihasilkan ke daerah. Dalam RAPBN 2015, besaran yang digunakan sebagai proporsi alokasi DAU adalah 27,7 persen dari PDN Netto.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Menurut peraturan perundangan, sebesar 2% penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagihasilkan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau. DBH cukai hasil tembakau ditujukan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal di daerah bersangkutan.

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, pengenaan denda administrasi, hibah, dan penerimaan di luar pajak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Menurut perundangan, sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang menghasilkan penerimaan tersebut. Kegiatan tertentu dimaksud meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan

pelatihan, penegakan hukum, pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu, serta pelestarian sumber daya alam.

Dengan adanya peraturan tersebut, sekalipun PNBPN yang dihasilkan dicatat dalam penerimaan negara secara menyeluruh, penggunaannya hanya dapat dialokasikan untuk belanja dari kementerian negara/lembaga yang menghasilkan PNBPN tersebut. Dengan kata lain, pemanfaatan PNBPN di-*earmarked* (sebagian), sesuai dengan besarnya persentase tertentu pagu penggunaan PNBPN untuk belanja K/L. Akibatnya, proporsi pagu penggunaan PNBPN mempengaruhi fleksibilitas dalam pengalokasian anggaran.

4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, khususnya pasal 31 ayat (4) mengamanatkan bahwa negara wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa alokasi 20% dari APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan ini adalah ketentuan yang bersifat imperatif, yakni bidang pendidikan harus diprioritaskan tanpa menafikan bidang-bidang lain yang juga penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 72 ayat (2) dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang berasal dari pemerintah

pusat yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap.

6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Sedangkan untuk besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Sejalan dengan semakin terbatasnya daya dukung APBN untuk menggerakan pembangunan sektor ekonomi secara berkesinambungan dan belum optimalnya pemanfaatan instrumen pembiayaan lainnya, peraturan perundangan mengamanatkan bahwa pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN yang diterbitkan tersebut dapat digunakan untuk infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat. Oleh karena itu, berbeda dengan kapasitas instrumen lainnya yang bisa digunakan secara fleksibel untuk menutupi defisit anggaran dan belanja negara, penggunaan SBSN terikat pada alokasi belanja tertentu.

3. Investasi

a. Konsep investasi

Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan *profit* di masa yang akan datang. Investasi tercipta dari penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak dengan tujuan memperbesar output. Investasi juga lazim disebut dengan istilah penanaman modal berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara (Pujoalwanto, 2014: 163).

Beberapa makna investasi menurut para ahli. Menurut Martono (dalam Pujoalwanto, 2014: 163) Investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Menurut Ahmad (dalam Pujoalwanto 2014: 164) Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang tersebut. Menurut Halim (dalam Pujoalwanto, 2014: 164) investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli tersebut, dapat dilihat bahwa investasi cenderung dipahami sebagai penanaman modal atau pembentukan modal. Dalam ranah ekonomi makro, investasi merupakan bagian komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan untuk

menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Pujoalwanto, 2014: 164).

Investasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu investasi swasta dan investasi pemerintah. Investasi swasta sendiri menurut sumbernya dibagi menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Sedangkan investasi pemerintah sendiri dialokasikan melalui belanja modal dan belanja lainnya yang berkaitan dengan penambahan aset pemerintah.

b. Teori Investasi

Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada bertambahnya stok capital dan selanjutnya menaikkan produktivitas. Di negara yang tingkat penganggurannya tinggi, seperti Indonesia sekarang, angkatan kerja yang menganggur dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan modal.

1) Teori Neo Klasik

Teori Neo Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi.

2) Teori Harrod-Dommar

Teori Harrod-Domar. *Harrod-Domar* mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar.

c. Belanja modal

Mengklasifikasikan belanja pemerintah menurut jenisnya belanja modal adalah salah satu bagian dari belanja pemerintah. Baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Belanja modal sendiri adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah (Direktorat Penyusunan APBN, 2014: 167).

Maka dari itu belanja modal ini dapat digunakan untuk mewakili investasi pemerintah, karena belanja modal ini tujuannya adalah menambah aset dari

pemerintah sendiri. Belanja modal di kelompokkan dengan jenis transaksi berupa (Direktorat Penyusunan APBN, 2014: 167-169):

1) Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administrative sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap untuk digunakan/dipakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3) Belanja Modal Gedung dan Pembangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian dan biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan.

5) Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi, dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal nonfisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

6) Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

4. Kependudukan

a. Konsep Penduduk

Penduduk merupakan obyek sekaligus subyek dari berbagai kebijakan pembangunan ekonomi dengan berbagai dinamikanya, sehingga penduduk menjadi bagian penting dalam perekonomian negara.

Menurut Boediono (dalam Pujoalwanto, 2014: 97) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Kata perkapita menggiring pemahaman tentang penduduk, karena kenaikan dalam proses di atas tidak lepas dari jumlah penduduk. Oleh karena itu, posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi menjadi penting, karena pertumbuhan ekonomi sendiri selalu terkait dengan jumlah penduduk.

b. Teori Kependudukan

Pentingnya penduduk dalam konteks pembangunan ekonomi perlu dipahami secara mendalam, agar dinamika kependudukan dapat ditelaah secara lebih jauh. Beberapa ahli mengungkapkan pandangannya tentang kependudukan, seperti: Mill (1956), Ehrlich (1971), Malthus (1976), Durkheim (1982), Dumont (1990).

Menurut Mill (dalam Pujoalwanto, 2014: 99) berpandangan bahwa laju pertumbuhan penduduk melalui laju pertumbuhan bahan makan sebagai suatu aksioma. Sedangkan menurut Ehrlich dalam bukunya *The Population Bomb* (dalam Pujoalwanto, 2014: 99) menggambarkan penduduk dan lingkungan yang ada di dunia dewasa ini sebagai berikut: pertama, dunia ini sudah terlalu banyak

manusia; kedua, keadaan bahan makanan sangat terbatas; ketiga, terlalu banyak manusia di dunia, sehingga lingkungan sudah banyak yang rusak dan tercemar.

Menurut Malthus, dalam bukunya *Principles of Population* (dalam Pujoalwanto, 2014: 99) menyebutkan bahwa perkembangan manusia lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena perkembangannya yang jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan hasil produksi pertanian, maka Malthus meramal akan terjadi malapetaka terhadap kehidupan manusia. Malapetaka tersebut timbul karena adanya tekanan penduduk tersebut. Sementara keberadaan lahan semakin berkurang karena pembangunan berbagai infrastruktur. Akibatnya akan terjadi bahaya pangan bagi manusia. Malthus menyarankan, agar manusia terhindar dari malapetaka karena kekurangan bahan makanan, maka diperlukan kontrol atau pengawasan pertumbuhan penduduk.

Durkheim (dalam Pujoalwanto 2014: 99) berpandangan bahwa pada suatu wilayah dimana angka kepadatan penduduknya tinggi akibat dari tingginya laju pertumbuhan penduduk, akan timbul persaingan di antara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Sementara Dumont (dalam Pujoalwanto, 2014: 99) berpandangan bahwa dimana tiap-tiap individu mempunyai kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat.

Secara garis besar pandangan tentang penduduk yang diungkapkan oleh para ahli tersebut menunjukkan bahwa ada kecenderungan ketidakseimbangan antara kebutuhan yang harus dipenuhi untuk penduduk, dengan kemampuan dalam

menyediakan kebutuhan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, dengan kata lain, kecepatan pertumbuhan penduduk lebih cepat dari kemampuan penyediaan kebutuhan penduduk (Pujoalwanto, 2014: 100).

c. Pertumbuhan Penduduk

Ada kalangan yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat memberikan kontribusi pada kenaikan penghasilan riil per kapita. Hal ini berlaku di negara-negara yang sudah maju. Kondisi masyarakat di negara yang sudah maju memungkinkan dapat melakukan tabungan sebagai modal untuk investasi (Pujoalwanto, 2014: 101).

Keynesian berpadangan bahwa tambahan penduduk tidak sekedar sebagai tambahan penduduk saja, tetapi juga berdampak naiknya daya beli. Selain itu, dengan adanya kenaikan jumlah penduduk, maka akan diiringi adanya kemajuan, meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja.

B. Penelitian Terkait

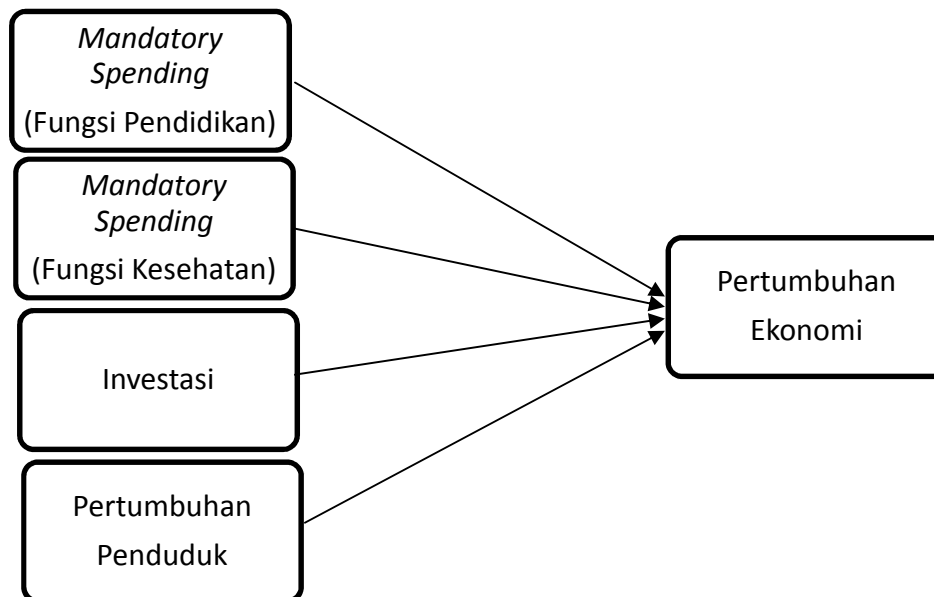
No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Jenis data dan alat analisis	Hasil Penelitian
1.	Bedir (2016)	<i>Healthcare Expenditure and Economic Growth in Developing Countries</i>	PDB perkapita, pengeluaran kesehatan perkapita	Data sekunder/ <i>time series</i> , OLS (<i>Ordinary Least Square</i>)	Pengeluaran kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap PDB di seluruh negara berkembang.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Jenis data dan alat analisis	Hasil Penelitian
2.	Rochaida (2016)	Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur	Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan keluarga sejahtera	Data sekunder/ <i>time series</i> , korelasi produk momen	Pertumbuhan penduduk ini memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.
3.	Rizky, dkk (2016)	Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia	PMA, PMDN, Belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi	Data sekunder/ <i>panel data</i> , FEM (<i>Fixed Effect Model</i>)	PMA mempengaruhi secara positif pertumbuhan ekonomi, PMDN berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.	Ananta (2013)	Determinan Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung	IPM, PDRB perkapita, Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan	Data sekunder/ <i>panel data</i> , FEM (<i>Fixed Effect Model</i>)	PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dan Pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
5.	Saraswati (2012)	<i>Public Spending Education and Inequality: A Case Study in Indonesia</i>	Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, pendapatan masyarakat, IPM, dan pertumbuhan ekonomi	Data sekunder/ <i>time series</i> , OLS (<i>Ordinary Least Square</i>)	Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Jenis data dan alat analisis	Hasil Penelitian
6.	Bastias (2010)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009	Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi	Data sekunder/ <i>time series</i> , ECM (<i>Error Correction Model</i>)	Dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
7.	Sodik (2007)	Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia	Investasi swasta, investasi pemerintah, pengeluaran pemerintah, ekspor-impor, tenaga kerja	Data sekunder/ <i>panel data</i> , FEM (<i>Fixed Effect Model</i>)	Investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, ekspor netto memiliki hubungan yang konsisten tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, dan angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.

C. Rerangka Pemikiran

Berikut ini kerangka berpikir dari pengaruh *mandatory spending*, investasi dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Jawa dan Sumatera Tahun 2011-2015.



Gambar 3. Bagan Kerangka Pemikiran

Mandatory spending ini adalah pengeluaran pemerintah yang telah diamanatkan oleh undang-undang yang terdiri dari UUD 1945 Amandemen ke-4 Pasal 31 ayat (4) yang mengatur tentang alokasi belanja fungsi pendidikan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang alokasi belanja fungsi kesehatan.

Sesuai dengan pandangan aliran ekonomi Keynesian yang mengutamakan peran pemerintah. Karena menurut Keynesian pengeluaran bagi pemerintah merupakan pendapatan bagi masyarakat. Dengan begitu maka perekonomian akan menjadi semakin tumbuh. Semakin banyak pemerintah menambah pengeluarannya maka akan mempercepat juga pertumbuhan ekonomi.

Aliran Ekonomi Keynesian menganjurkan bahwa sektor publik harus ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian, keynes berpendapat bahwa swasta tidak dapat diberikan sepenuhnya kekuasaan dalam mengelola perekonomian, karena sesuai dengan tujuannya swasta hanya memiliki tujuan untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan jika hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif.

Maka dari itu sektor publik perlu ikut campur tangan dengan menyediakan pelayanan sektor publik yang tentunya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan seperti swasta. *Mandatory spending* fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan ini adalah salah satu upaya sektor publik dalam menyediakan pelayanan sektor publik. Karena pengeluaran untuk fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan ini tidak akan disediakan oleh swasta.

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah investasi dan pertumbuhan penduduk. Menurut Levine dan Renelt (1992) variabel kontrol adalah variabel yang telah diakui secara luas sebagai penentu pertumbuhan ekonomi.

Untuk investasi dan pertumbuhan penduduk, sesuai dengan Teori Neo-Klasik dimana investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk maka makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Sollow, dan

Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Maka sudah jelas bahwa investasi dan pertumbuhan penduduk ini dapat digunakan sebagai variabel kontrol. Karena investasi dan pertumbuhan penduduk ini telah diakui oleh Teori Neo-Klasik sebagai penentu pertumbuhan ekonomi.

D. Hipotesis Penelitian

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan beberapa dugaan sementara atau hipotesis sebagai berikut.

1. *Mandatory spending* fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera.
2. *Mandatory spending* fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera.
3. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera.
4. Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera.
5. *Mandatory spending*, investasi, dan pertumbuhan penduduk secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang menggambarkan suatu objek yang diteliti. Dalam penelitian ini untuk menjelaskan gambaran dari *mandatory spending* ini dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dengan berdasarkan pada data kuantitatif yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dua variabel bebas yang digunakan yaitu *mandatory spending* fungsi pendidikan yang disimbolkan (MS1) dan *mandatory spending* fungsi kesehatan yang disimbolkan (MS2). Penelitian ini menggunakan variabel kontrol dalam mengukur pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah pertumbuhan penduduk disimbolkan dengan (GP) dan investasi yang diwakili oleh data belanja modal dan disimbolkan dengan (I). Penelitian ini juga menggunakan satu variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Data dalam penelitian ini didapat dari beberapa sumber mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), dan juga data sekunder lainnya. Data dari tahun 2011 hingga tahun 2015, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Pemilihan data panel dalam penelitian ini karena adanya keterbatasan data dalam penelitian ini, jika data yang digunakan dalam bentuk *time series* maka tahun yang dapat digunakan hanya tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Hal ini dikarenakan undang-undang yang mengatur tentang pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan baru disahkan pada tahun 2009 dan tahun 2010 dianggap tahun pertama dalam penerapan peraturan ini sehingga masih ada kemungkinan banyak provinsi yang belum mengetahui peraturan ini. Jika menggunakan *time series* maka dikhawatirkan hasil penelitian akan menjadi bias, oleh karena itu maka dalam penelitian ini menggunakan data panel.

Sementara itu untuk sampel penelitian Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dipilih karena rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2011-2015 sebesar 5.96% dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5.75% hal ini berarti rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa ini masih berada sedikit di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan jika dilihat berdasarkan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB), Pulau Jawa berkontribusi sangat besar yaitu sebesar 57.73%. Sebaliknya dengan Pulau Sumatera rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2011-2015 hanya sebesar 5% hal ini berarti rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera ini masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5.75%, sedangkan jika dilihat berdasarkan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB), Pulau Sumatera hanya berkontribusi sebesar 22.09%.

Tabel 5. Deskripsi Variabel

Variabel	Satuan Pengukuran	Sumber Data
<i>Mandatory Spending</i> - Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan (MS1) - Pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan (MS2)	Persentase	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pertumbuhan Penduduk (GP)	Persentase	Badan Pusat Statistik
Belanja Modal (I)	Persentase	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	Badan Pusat Statistik

B. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini, peneliti mempersempit paparan penelitian dengan menggunakan batasan operasional variabel sebagai berikut.

1. *Mandatory Spending*

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran pemerintah yang telah diamanatkan oleh konstitusi dengan persentase tertentu (Dirjen Anggaran, 2014: 156). *Mandatory Spending* dalam APBD mengatur mengenai:

1) Belanja Fungsi Pendidikan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 khususnya pasal 31 ayat (4) mengamanatkan untuk mengalokasikan belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD. Data belanja fungsi pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio realisasi pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan terhadap total APBD di seluruh provinsi di Jawa dan Sumatera tahun anggaran 2011-2015.

$$MS1 = \frac{\text{Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan}_t}{\text{Total APBD}_t} \times 100 \quad (3.1)$$

Data belanja fungsi pendidikan diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang diolah. Satuan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase.

2) Belanja Fungsi Kesehatan

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 171 ayat (2) dijelaskan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji.

Data belanja fungsi kesehatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio realisasi pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan terhadap total APBD di seluruh provinsi di Jawa dan Sumatera tahun anggaran 2011-2015.

$$MS2 = \frac{\text{Pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan}_t}{\text{Total APBD}_t} \times 100 \quad (3.2)$$

Data belanja fungsi kesehatan diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang diolah. Satuan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase.

2. Investasi

Dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol, investasi yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel utama yaitu *mandatory spending* terhadap pertumbuhan ekonomi. Data investasi dalam penelitian ini bersumber dari rasio belanja modal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut

Dirjen Anggaran (2014) belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Data investasi ini diperoleh dengan.

$$\text{Investasi} = \frac{\text{Belanja Modal}_t}{\text{Total APBD}_t} \times 100\% \quad (3.3)$$

Data investasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Satuan pengukuran yang digunakan adalah persentase.

3. Pertumbuhan Penduduk

Variabel kontrol lainnya adalah pertumbuhan penduduk. Data pertumbuhan penduduk ini didapat dengan perhitungan jumlah penduduk tahun hitung dikurangi dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya dan dikali dengan seratus. Atau secara matematis pertumbuhan penduduk ini diperoleh dengan.

$$\begin{aligned} \text{GP} \\ = \frac{\text{Jumlah Penduduk}_t - \text{Jumlah Penduduk}_{t-1}}{\text{Jumlah Penduduk}_{t-1}} \times 100\% \end{aligned} \quad (3.4)$$

data penduduk diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan satuan pengukuran yang digunakan adalah persentase.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah variabel terikat dalam penelitian ini. Formula yang digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah:

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \quad (3.5)$$

Data pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Karena jika pertumbuhan PDRB yang digunakan adalah atas dasar harga berlaku maka akan memberi hasil yang tidak akurat, karena adanya pengaruh inflasi. Maka dari itu pada penelitian ini menggunakan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010, seluruh provinsi di Sumatera dan Jawa tahun 2011-2015. Data pertumbuhan ekonomi ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

C. Model dan Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah dengan deskriptif kuantitatif untuk menganalisa tingkat kepatuhan provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera dalam mengalokasikan belanja daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku (*mandatory spending*) yaitu

1. *Mandatory spending* fungsi pendidikan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-4, khususnya pasal 31 ayat (4) mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Dalam menganalisa tingkat kepatuhan provinsi terhadap *mandatory spending* fungsi pendidikan maka diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu mematuhi, tidak patuh dan sangat tidak patuh. Provinsi yang mematuhi *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah yang mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan 20% terhadap APBD atau diatasnya, selanjutnya provinsi yang tidak patuh adalah provinsi yang mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan dalam interval 10% sampai dengan 19.99% terhadap APBD dan terakhir provinsi yang sangat tidak mematuhi adalah provinsi yang mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan dalam interval 0% sampai dengan 9.99% terhadap APBD.

2. *Mandatory spending* fungsi kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, khususnya pasal 171 ayat (2) menyatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sama dengan *mandatory spending* fungsi pendidikan tadi dalam menganalisa tingkat kepatuhan provinsi terhadap *mandatory spending* fungsi kesehatan ini maka diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu mematuhi, tidak patuh, dan sangat tidak patuh. Provinsi yang mematuhi *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah provinsi mengalokasikan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan 10% terhadap APBD atau diatasnya,

selanjutnya provinsi yang tidak patuh adalah provinsi yang mengalokasikan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan dalam interval 5% sampai dengan 9.99% terhadap APBD dan yang terakhir provinsi yang sangat tidak patuh adalah provinsi yang mengalokasikan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan dalam interval 0% sampai dengan 4.99% terhadap APBD.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan regresi untuk mengukur pengaruh dari *mandatory spending*, investasi dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Levine dan Renelt (1992) sebagai penentu pertumbuhan ekonomi, sebuah penelitian harus menggunakan variabel kontrol, yang mana variabel kontrol adalah variabel yang telah diakui secara luas sebagai penentu pertumbuhan ekonomi. Variabel kontrol terdiri antara lain *initial level of GDP*, pertumbuhan jumlah penduduk, rasio investasi terhadap GDP dan kualitas sumber daya manusia dan lainnya. Dengan pertimbangan itu maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa dari variabel kontrol tersebut sebagai penentu pertumbuhan ekonomi. Untuk itu model regresi dalam penelitian ini adalah.

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 MS1_{it} + \beta_2 MS2_{it} + \beta_3 I_{it} + \beta_4 GP_{it} + \varepsilon_{it}$$

keterangan:

PE = Pertumbuhan Ekonomi

MS1 = *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan (Persentase)

MS2 = *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan (Persentase)

I = Investasi (Persentase)

GP = Pertumbuhan Penduduk (Persentase)

i = Provinsi ke-i (1,2,.....,16)

t = Tahun pengamatan (2011, 2012,....., 2015)

= Variabel Gangguan

Dalam penelitian ini dapat menggunakan tiga pendekatan untuk mengestimasi model regresi (Widarjono 2013:355). Yaitu sebagai berikut:

1. Koefisien tetap antar waktu dan individu (*Common Effect*)

Model regresi *Common Effect* merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel, hanya dengan menggabungkan data *cross section* dan *time series* tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, maka model dapat diestimasi dengan metode *ordinary least square* (OLS).

2. *Slope* konstan tetapi intersep berbeda antar individu (*Fixed Effect*)

Asumsi yang dipakai dalam model regresi *fixed effect*, bahwa intersep adalah berbeda antar individu sedangkan slopenya tetap sama antar individu. Untuk mengestimasi model *fixed effect* adalah dengan menggunakan metode teknik variabel *dummy* untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variables* (LSDV).

3. *Random Effect*

Dimasukkannya variabel *dummy* di dalam model *fixed effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error terms*) dikenal sebagai metode *random effect*.

D. Uji Signifikansi Model

Uji ini dilakukan untuk mengetahui model mana yang paling tepat untuk mengestimasi model regresi dalam penelitian ini antara metode OLS (*common*), Model *fixed effect*, dan model *random effect*. Berikut uji signifikansi model yang akan digunakan dalam penelitian ini (Widarjono, 2013:362).

1. Uji Signifikansi Model *Fixed Effect*

Uji signifikansi ini bertujuan untuk menentukan model yang paling baik, antara *fixed effect* dan *common effect*. Pengujian ini dilakukan dengan uji Chow yang merupakan uji perbedaan dua model regresi dengan menggunakan uji F statistik.

2. Uji Signifikansi Model *Random Effect*

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik dari model *common effect*. Pengujian ini dilakukan dengan statistik uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang dikembangkan oleh Beusch-Pagan (uji Beusch-Pagan). Statistik uji LM ini mengikuti distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* (df) sebesar jumlah variabel independen. Uji Beusch-Pagan digunakan untuk menguji signifikansi model *random effect* didasarkan pada nilai residual dari model *common effect*.

3. Uji Signifikansi *Fixed Effect* atau *Random Effect*

Uji ini dilakukan apabila berdasarkan hasil pengujian diatas ternyata model *fixed effect* dan *random effect* lebih baik dari metode *common effect*. Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang paling baik antara model *fixed effect* atau *random effect*. Uji ini secara formal dikembangkan oleh Hausman. Uji Hausman

ini didasarkan pada ide bahwa kedua metode OLS dan GLS konsisten tetapi OLS tidak efisien di dalam hipotesis nol. Uji Hausman menggunakan statistik uji H yang mengikuti distribusi *chi-square* dengan *degree of freedom* (df) sebesar jumlah variabel independen. Kesimpulan yang diambil adalah: jika H_0 ditolak, maka model regresi *fixed effect* lebih baik daripada *random effect*. Tetapi jika H_0 diterima, berarti model regresi *random effect* lebih baik dari pada *fixed effect*.

E. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan pendekatan OLS. Uji linieritas hampir tidak dilakukan pada setiap model regresi linier Karena sudah diasumsikan bahwa model bersifat linier. Kalaupun harus dilakukan semata-mata untuk melihat sejauh mana tingkat linieritasnya.

Autokorelasi hanya terjadi pada data *time series*. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat *time series* (*cross section* atau panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti. Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data *cross section*, dimana data panel lebih dekat ke ciri data *cross section* dibandingkan *time series*. Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan.

Menurut Widarjono (2013) uji asumsi klasik dilakukan agar hasil dari pengujian hipotesis berdasarkan model analisis tersebut tidak bias atau menyesatkan. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

1. Uji Multikolinieritas

Menurut Gujarati (2004), multikolinieritas adalah hubungan linier yang terjadi diantara variabel-variabel independen. Pengujian terhadap gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan menghitung *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil estimasi. Jika $VIF < 10$ maka antara variabel independen tidak terjadi hubungan yang linier (tidak ada multikolinieritas).

Ho: $VIF > 10$, terdapat multikolinieritas antar variabel independen.

Ha: $VIF < 10$, tidak ada multikolinieritas antar variabel independen.

Didalam penelitian ini peneliti mengharapkan $VIF < 10$ sehingga tidak terjadi multikolinieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Suatu model yang baik adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan atau residualnya konstan. Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana asumsi tersebut tidak tercapai, dengan kata lain dimana adalah ekspektasi dari eror dan adalah varians dari eror yang berbeda tiap periode waktu.

Dampak adanya heteroskedastisitas adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya tetap konsisten dan tidak bias. Eksistensi dari masalah heteroskedastisitas akan menyebabkan hasil Uji- t dan Uji-F menjadi tidak berguna (*miss leading*).

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas, tetapi dalam penelitian ini hanya akan dilakukan dengan menggunakan metode informal yang dilakukan dengan cara melihat plot data residual kuadrat. Untuk mengetahui apakah penelitian ini terdeteksi heteroskedastisitas atau tidak maka melihat kecenderungan dari plot residual kuadrat yang dihasilkan. Jika residual mempunyai varian yang sama (homoskedastisitas) maka kita tidak mempunyai pola yang pasti dari residual. Sebaliknya jika residual mempunyai sifat heteroskedastisitas, residual ini akan menunjukkan pola yang tertentu.

F. Uji p value

p value adalah ukuran probabilitas kekuatan dari bukti untuk menolak atau menerima H_0 . Semakin kecil nilai p yang diperoleh maka semakin kuat bukti tersebut untuk H_0 (E-Learning Gunadarma, 2011). Selain itu p value juga untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam suatu regresi dengan melihat tingkat probabilitas dan alpha. Jika nilai p value lebih kecil dari tingkat alpha maka terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, begitu juga sebaliknya jika nilai p value lebih besar dari tingkat alpha maka tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Di dalam penelitian ini alpha atau tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 0.05 atau 5%.

Alpha 5% digunakan untuk memastikan bahwa hasil penelitian berpengaruh secara signifikan atau berpengaruh secara nyata dengan tingkat kekeliruan sebesar 5%.

G. Uji F Statistik (*overall test*)

Uji F-Statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah *mandatory spending* fungsi pendidikan, *mandatory spending* fungsi kesehatan, investasi dan Pertumbuhan penduduk secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kriteria uji F tersebut adalah sebagai berikut: pada taraf uji α , jika nilai statistik uji F (F_{hitung}) lebih besar dari nilai F kritis maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sebaliknya jika nilai statistik uji F (F_{hitung}) lebih kecil dari nilai F kritis maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

H_0 : $\beta_{1,2,3,4} = 0$ secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

H_1 : $\beta_{1,2,3,4} \neq 0$ secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan yang diambil adalah jika H_0 ditolak, maka ada variabel bebas yang berpengaruh. Tetapi jika H_0 diterima, berarti semua variabel bebas tidak berpengaruh.

H. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengamatan terhadap koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas secara bersama-sama memberi penjelasan terhadap variabel terikat. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Koefisien determinasi berguna untuk menguji kekuatan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uji dan pembahasan yang telah dilakukan tentang pengaruh *mandatory spending*, investasi dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Jawa dan Sumatera tahun 2011-2015 dengan pendekatan FEM (*Fixed Effect Model*) dan kepatuhan *mandatory spending* di Jawa dan Sumatera tahun 2011-2015, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Tidak ada provinsi yang mematuhi *mandatory spending* fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan ini secara bersamaan. Sedangkan provinsi yang mematuhi *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah Provinsi DKI Jakarta dengan persentase terhadap APBD 28.66% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.22%. Provinsi yang mematuhi *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah Provinsi Sumatera Barat dengan persentase terhadap APBD 11.35% dan pertumbuhan ekonomi 6.00%, Provinsi Bengkulu dengan persentase terhadap APBD 13.39% dan pertumbuhan ekonomi 6.07%, Provinsi Lampung dengan persentase terhadap APBD 10.14% dan pertumbuhan ekonomi 5.79%, Provinsi Jawa Tengah dengan persentase terhadap APBD 10.73% dan pertumbuhan ekonomi 5.29%, dan terakhir Provinsi Jawa Timur dengan persentase terhadap APBD 13.11% dan pertumbuhan ekonomi 6.09%..

2. *Mandatory spending* fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Jawa dan Sumatera. Variabel *mandatory spending* fungsi pendidikan ini memiliki tingkat pengaruh signifikansi 95% dan memiliki koefisien regresi sebesar 0.1028. Hal ini berarti setiap peningkatan rasio pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan terhadap APBD sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.1028% *ceteris paribus*.
3. *Mandatory spending* fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Jawa dan Sumatera. Variabel *mandatory spending* fungsi kesehatan memiliki tingkat pengaruh signifikansi 95% dan memiliki koefisien regresi sebesar 0.0988. Hal ini berarti setiap peningkatan rasio pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan terhadap APBD sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.0988% *ceteris paribus*.
4. Investasi yang diwakili oleh belanja modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Jawa dan Sumatera. Variabel investasi ini memiliki tingkat pengaruh signifikansi 95% dan memiliki koefisien regresi sebesar 0.0352. Hal ini berarti setiap peningkatan rasio belanja modal terhadap APBD sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.0352% *ceteris paribus*.

5. Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Jawa dan Sumatera. Variabel investasi ini memiliki tingkat pengaruh signifikansi 95% dan memiliki koefisien regresi sebesar 6.9958. Hal ini berarti setiap peningkatan pertumbuhan penduduk sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.9958% *ceteris paribus*.
6. Secara bersama-sama *mandatory spending*, investasi dan pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran antara lain:

1. Kesadaran pemerintah provinsi terhadap *mandatory spending* harus dapat ditingkatkan, dengan meningkatnya kesadaran pemerintah provinsi terhadap *mandatory spending* maka akan mendorong pemerintah provinsi mengalokasikan pengeluaran pemerintah sesuai dengan peraturan yang telah ada, sehingga hak-hak dari masyarakat dapat diperoleh sepenuhnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Begitu juga dengan lembaga legislatif di daerah, harus bisa mengawasi pengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga dengan adanya pengawasan maka akan membuat pengalokasian yang sesuai dengan peraturan yang ada yaitu 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk fungsi kesehatan, selain itu pengawasan diperlukan agar pengalokasian pengeluaran pemerintah ini dapat tepat sasaran sehingga akhirnya akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi

2. Investasi pemerintah melalui belanja modal perlu dioptimalkan, belanja modal untuk tiap daerah sudah pastinya tinggi, karena setiap pemerintah daerah menginginkan daerahnya untuk maju dalam pembangunan. Namun dalam penerapannya perlu pengawasan yang lebih serius sehingga pengeluaran untuk belanja modal ini memang dapat tercapai sebagaimana dengan mestinya sehingga *outcome* yang didapatkan dari belanja modal ini akan dapat tercapai.

3. Meskipun pertumbuhan penduduk ini berpengaruh sangat signifikan dalam penelitian ini, namun pemerintah tetap perlu untuk mengontrol pertumbuhan penduduk. Karena dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, maka secara per kapita PDRB akan semakin menurun. Selain itu lapangan kerja juga akan semakin berkurang akibatnya pengangguran akan semakin meningkat. Akan lebih baik jika dengan penduduk yang ada ditingkatkan kualitasnya sehingga produktivitas akan dapat ikut meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Prayudha. 2013. Determinan Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (tidak dipublikasikan).
- Austin. Stupak. 2015. *Mandatory Spending Since 1962*. Congressional Research Service. United States.
- Bastias, Desi D. 2010. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan).
- Bedir, Serap. 2016. "Healthcare Expenditure and Economic Growth Developing Countries". *Horizon Research Publishing Corporation*. Advances in Economics and Business Vol.4. No.2. pp.76-86.
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2014. *Postur APBN Indonesia*. Kementerian Keuangan. Jakarta. Indonesia.
- Direktorat Penyusunan APBN. 2014. *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*. Kementerian Keuangan. Jakarta. Indonesia.
- Djayasinga, Marselina. 2006. *Ekonomi Publik Suatu Pengantar*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Gunadarma. 2010. *Statistika*. E-Learning Gunadarma. Jakarta.
- Fay, Rodgers. 2014. *Appropriations For Mandatory Expenditures*. Harvard Law School Federal Budget Policy Seminar. Cambridge.
- Gujarati, Damodar. 2004. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Erlangga, Jakarta.
- Haryanto. 2015. "Desentralisasi Fiskal Seutuhnya". Artikel dan Opini Kementerian Keuangan, Indonesia.

- Levine. Renelt. 1992. "A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions". *American Economic Review*. Vol. 82 No.4.
- Prasetya, Ferry. 2012. *Modul Ekonomi Publik: Teori Pengeluaran Pemerintah*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Pujoalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rizky. Agustin. Mukhlis. 2016. "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Vol.8. No.1. Maret 2016.
- Rochaida, Eny. 2016. "Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur". *Forum Ekonomi*. Vol. 18 No.1.
- Samuelson. Paul Nordhaus. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. Media Global Edukasi. Jakarta.
- Saraswati, Erwin. 2012. "Public Spending Education and Inequality : A Case Study in Indonesia". *International Journal of Social Science and Humanity*. Vol.2 No.5. pp. 427-431.
- Sodik. 2007. "Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Kasus Data Panel di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*. Hal. 27-36.
- Widarjono. Agus. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.